

**STUDI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENGUSAHAAN
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BONTO BAHARI DI
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

ASHILAH MUTHIAH USMAN



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**STUDI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENGUSAHAAN
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BONTO BAHARI DI
KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**ASHILAH MUTHIAH USMAN
L051 18 1012**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI FUNGSI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENGUSAHAAN PANGKALAN
PENDARATAN IKAN (PPI) BONTO BAHARI DIKECAMATAN BONTO BAHARI
KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

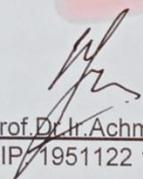
Disusun dan diajukan oleh

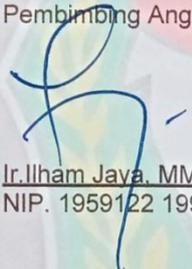
Ashilah Muthiah Usman
L051181012

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian dalam rangka penyelesaian studi
Program Sarjana Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 07 Juni 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui:

Pembimbing Utama

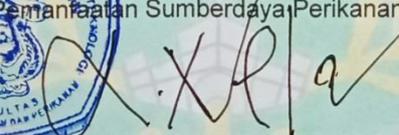
Pembimbing Anggota


Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, DEA
NIP. 1951122 197603 1 001


Ir. Ilham Jaya, MM
NIP. 1959122 199103 1001

Mengetahui,




Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si
NIP. 19660115 199503 1 002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashilah Muthiah Usman
NIM : L051 18 1012
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul : "Studi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).



Makassar, Juni 2022

Ashilah Muthiah Usman
L051181012

PERNYATAAN AUTHORSHIP

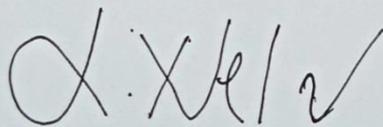
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashilah Muthiah Usman
NIM : L051 18 1012
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi skripsi harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diteruskan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan

Makassar, Juni 2022

Mengetahui,



Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si
NIP.19710703 199702 1 002

Penulis



Ashilah Muthiah Usman
L051 18 1012

ABSTRAK

Ashilah Muthiah Usman. L051 18 1012. Studi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah bimbingan **Achmar Mallawa** sebagai pembimbing utama dan **Ilham Jaya** sebagai pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi fungsi-fungsi PPI yang berjalan sesuai dengan fungsinya berdasarkan PER.08/MEN/2012, (2) menghitung tingkat keberfungsian berdasarkan PER.08/MEN/2012. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga February 2021 di PPI Bonto Bahari, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang terdapat di PPI dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta pengisian kuesioner. Identifikasi fungsi dianalisis secara deskriptif, tingkat keberfungsian dianalisis menggunakan metode skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) untuk fungsi pemerintahan hanya terdapat tiga dari sepuluh fungsi yang terlaksana yaitu pengumpulan data tangkapan & hasil perikanan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan serta pemantauan wilayah pesisir sedangkan fungsi pengusahaan hanya terdapat empat dari sembilan fungsi yang terlaksana yaitu pelayanan tambat dan labuh kapal, pemanfaatan lahan dan fasilitas, pelayanan bongkar muat ikan, serta pemasaran dan distribusi ikan. (2) Tingkat keberfungsian untuk sepuluh fungsi pemerintahan dengan nilai kesesuaian sebesar 28%, untuk sembilan fungsi pengusahaan dengan nilai kesesuaian sebesar 40%, kedua fungsi ini termasuk dalam kategori $\leq 50\%$ tidak berfungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros pada umumnya tidak berjalan sebagaimana fungsinya.

Kata kunci: Fungsi, PPI Bonto Bahari, Maros

ABSTRACT

Ashilah Muthiah Usman. L051 18 1012. *Study Of Government Function and Business Function of Bonto Bahari Fish Landing Base (PPI) in Bontoa District, Maros regency, South Sulawesi Province, supervised by Achmar Mallawa as the main supervisor and Ilham Jaya as co-supervisor.*

This research aims to (1) Identify the functions of PPI that working as its function according to PER.08/MEN/2012, (2) calculated the functioning rate according to PER.08/MEN/2012. This research was conducted in November until December 2021 at PPI Bonto Bahari, Bontoa District, Maros regency, South Sulawesi province. The method in this research used a case study method through direct observation of the activities at PPI by collected primary and secondary data obtained by using observation, interview and questionnaire filling. Identification function was analyzed by descriptively, the function rate was analyzed by using a scoring method. So the results are (1) for the function of government there are only three of ten functions are implemented is catch & fishery data collection, supervision and control of fish resources and monitoring of coastal areas and business function there are only four of nine functions are implemented is mooring services, utilization of land and facilities, fish loading and unloading services, and marketing and distribution of fish, (2) The functioning rate for ten government functions is 28% suitability value, for nine business functions is 40% suitability value, these two functions are included in the category of \leq 50% non-functioning. The conclusion is that the government function and the business function at PPI Bonto Bahari Maros Regency are not working generally as its function.

Key words: *Function, PPI Bonto Bahari, Maros*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Hidayah-NYA skripsi yang berjudul “**Studi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan**” yang dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula kita panjatkan shalawat, salam, dan taslim kepada junjungan dan teladan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, semoga dengan selalu bersholawat, kita akan mendapat syafaatnya kelak. Aamiin

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui skripsi ini diucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis **Ir. Muh Usman, MM** dan **Radiatan Mardiyah** yang senantiasa mendoakan, meridhoi, mendukung, dan membimbing disetiap langkah, kepada saudara-saudara penulis **Anisah** dan **Adinda** yang selalu menghibur di setiap kesulitan yang dihadapi.
2. Bapak **Dr. Fahrul, S.Pi, M.Si** selaku Penasihat Akademik penulis yang selalu membimbing dan mencurahkan perhatiannya kepada penulis selama masa studi
3. Bapak **Prof.Dr.Ir Achmar Mallawa, DEA** yang sangat membantu penulis dalam memberi saran dan arahan dari awal pemilihan judul hingga skripsi ini diselesaikan dengan baik serta bapak **Dr.Ir. Mahfud Palo, M.Si** yang selalu mengajarkan penulis apa arti disiplin dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4. Bapak **Prof.Dr.Ir Achmar Mallawa, DEA** dan **Ir. Ilham Jaya, M.M.** selaku pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya sehingga sangat bermanfaat dan membangun kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Fahrul, S.Pi, M.Si** dan **Safruddin, S.Pi, M.Si., Ph.D** selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Om **Yuliadi Yusran** beserta keluarga yang sangat berjasa dalam proses penelitian ini dengan memberikan naungan dan bantuan kepada penulis saat penelitian berlangsung

7. Saudara terbaik **Yunisa Putri Andari, S.Pi** yang senantiasa memberi doa, semangat, waktunya serta mengurus segala kebutuhan penulis dengan rasa sayang dan ikhlas di segala proses dari awal hingga saat ini. Semoga Allah SWT menyayangimu selalu
8. Sahabat terbaik penulis **Fiqri, icha Safira, Izza**, yang selalu menjadi teman terbaik penulis hingga saat ini
9. **Staf Fakultas dan departemen** terkhusus kepada, kak asdir, kak nizar, pak yesi yang selalu memudahkan penulis dalam pengurusan berkas serta **dosen pengajar khususnya para dosen program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan** atas semua ilmu yang bermanfaat bagi penulis
10. Kawan-kawan **PSP 2018, Louhan 18** serta **KMP PSP UNHAS**, dan **KEMAPI UNHAS** yang telah menampung dan memberikan ilmu serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis
11. Kepada **diri saya** karena selalu percaya kepada kemampuannya, telah melakukan semua kerja keras ini, tidak pernah berhenti dan menolak untuk menyerah, berusaha untuk menjadi lebih baik, mencoba memberi lebih dari yang saya terima, mencoba untuk melakukan lebih banyak yang benar daripada yang salah, ***You always did your best girl, proud of you! cheers!***
12. Kepada setiap pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, apa yang telah tertuang dalam skripsi ini semoga bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam rangka memajukan pembelajaran dalam bidang perikanan khususnya pelabuhan perikanan. Namun perlu diketahui bahwa skripsi ini masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juni 2022

Ashilah Muthiah Usman

BIODATA PENULIS



Penulis lahir pada tanggal 21 Februari 2001 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Merupakan anak pertama dari pasangan bapak Ir.Muh Usman, MM. dan Ibu Radiatan Mardiyah. Penulis mengawali pendidikan di TK Sejahtera dan tamat pada tahun 2006. Tahun 2012 penulis lulus di SD Negeri Balang Baru Makassar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Makassar dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SMA Negeri 2 Makassar lulus pada tahun 2018. Tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Selama menjalani masa studi, penulis aktif dalam melaksanakan perkuliahan dan aktif dalam berbagai kepanitiaan dan organisasi kemahasiswaan di lingkup fakultas yakni anggota KMP PSP KEMAPI FIKP UNHAS & HMJ KEMAPI FIKP UNHAS

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pelabuhan Perikanan	4
B. Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan	5
C. Tipe dan Kriteria Pelabuhan Perikanan	10
D. Pangkalan Pendaratan Ikan	11
E. Fasilitas Pelabuhan	12
F. Tingkat Keberfungsian Pangkalan Pendaratan Ikan	18
III. METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Tempat	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Metode Penelitian	21
D. Analisis Data	23
IV. HASIL	29
A. Keadaan Umum Kabupaten Maros	29
B. Keadaan Umum PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	29
C. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	35
D. Analisis Fungsi-Fungsi PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	48
V. PEMBAHASAN	60
A. Analisis Keberfungsian PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	60
B. Fungsi Pemerintahan Pada PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	81
C. Fungsi Perusahaan Pada PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	83
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	iv
LAMPIRAN.....	v

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.	Alat dan bahan beserta kegunaan 21
2.	Analisis pelaksanaan fungsi PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 24
3.	Analisis tingkat keberfungsian PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berdasarkan fungsi pemerintahan 26
4.	Analisis tingkat keberfungsian PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berdasarkan fungsi perusahaan 27
5.	Jumlah produksi dan nilai produksi penangkapan ikan dilaut Kabupaten Maros pada tahun 2019,2020,2021 33
6.	Jumlah ikan yang didaratkan di PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros Tahun 2021 34
7.	Armada penangkap ikan di Kabupaten Maros Tahun 2021 34
8.	Jumlah dan ukuran armada penangkapan ikan di PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros Tahun 2021 35
9.	Fasilitas yang terdapat di PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 36
10.	Fasilitas pokok PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 36
11.	Luas daratan yang terpakai di PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 41
12.	Fasilitas fungsional PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 41
13.	Fasilitas penunjang PPI Bonto Bahari 47
14.	Fungsi PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berdasarkan hasil wawancara . 49
15.	Analisis pelaksanaan fungsi PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 49
16.	Tingkat keberfungsian PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berdasarkan fungsi pemerintahan 56
17.	Tingkat keberfungsian PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berdasarkan fungsi perusahaan 58

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Ilustrasi bentuk dermaga	14
2.	Ilustrasi bentuk <i>bollard</i>	15
3.	Ilustrasi pemecah gelombang	15
4.	Peta lokasi penelitian	21
5.	<i>Layout</i> PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	30
6.	Struktur organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I	31
7.	Struktur organisasi KCD Mamminasata	32
8.	Dermaga PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	37
9.	Kapal yang bersandar di dermaga	37
10.	<i>Bollard</i> PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	37
11.	<i>Fender</i> PPI Bonto Bahari	38
12.	Tangga yang terdapat di dermaga	38
13.	Kolam pelabuhan PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	38
14.	Keadaan kolam pelabuhan	39
15.	Pendangkalan yang terjadi pada kolam pelabuhan	39
16.	Jalanan dalam kompleks PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	40
17.	Saluran drainase PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	40
18.	Kondisi saluran drainase PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	40
19.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	42
20.	Kondisi atap TPI PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	42
21.	Kantor administrasi PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	43
22.	Menara dan tangki air bersih PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	43
23.	Gedung penyulingan air tawar PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	44
24.	Tangki penyulingan air tawar PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	44
25.	Instalasi listrik PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	45
26.	Gedung instalasi listrik PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	45
27.	Bangunan bengkel PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros tampak samping ...	46
28.	Bangunan bengkel PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros tampak depan	46
29.	Pos jaga PPI Bonto Bahari	47
30.	Gedung kantin, koperasi dan MCK PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros ...	48
31.	Kondisi gedung kantin, koperasi, dan MCK	48
32.	MCK PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros	48

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1.	Fasilitas-fasilitas PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 95
2.	Perhitungan pemanfaatan lahan dan fasilitas PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros 95
3.	Kuisisioner penelitian 95
4.	Dokumentasi penelitian 104
5.	Data laporan bulan Januari-September PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros Tahun 2021 107
6.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan..... 121

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Maros berada di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45'-50°07' lintang selatan dan 109°205'-129°12' bujur timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep sebelah utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat. Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 km² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan (Pembkab Maros, 2014).

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pengembangan pada sektor perikanan, hal ini didukung dengan kondisi wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Maros pada tahun 2019 sebesar 18.108,3 Ton (PPID Sulsel, 2019).

Melihat potensi tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan yang berkaitan dengan perikanan, seperti bongkar muat barang yang berhubungan dengan hasil perikanan salah satunya adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) untuk menunjang kegiatan penangkapan ikan agar hasilnya lebih maksimal dalam rangka pembangunan ekonomi perikanan.

Tujuan pembangunan pelabuhan perikanan adalah untuk menyediakan wadah bagi keberlangsungan kegiatan perikanan tangkap. Pelabuhan perikanan merupakan tempat vital bagi kegiatan operasional seperti penambatan atau penambatan kapal penangkap ikan, pelelangan hasil tangkapan, pelayanan kegiatan penangkapan dan penangkapan, pemasaran dan distribusi hasil tangkapan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, salah satunya yaitu dengan memberikan kemudahan kepada nelayan terutama dalam upaya memperlancar operasi penangkapan, pendaratan hasil perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan (Abriani, 2020).

Pelabuhan perikanan/PPI perlu dikelola dengan baik dari segi kegiatan dan fasilitas yang dimiliki. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perikanan tangkap adalah optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan/PPI yang dapat mendukung nelayan tradisional dan memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan wilayah dan wilayah. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan nelayan pada khususnya, pemerataan pembangunan, perluasan

kesempatan kerja dan mengurangi arus urbanisasi yang terjadi selama ini (Wahyuni, 2007).

Penelitian sebelumnya mengenai fungsi-fungsi pangkalan pendaratan ikan (PPI) telah dilakukan diantaranya Suharsi (2020) analisis fungsi-fungsi pangkalan pendaratan ikan (PPI) cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan, Wanda (2019) studi fungsi-fungsi pangkalan pendaratan Ikan (PPI) Balambang di Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, yusran (2019) studi fungsi-fungsi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Amnihani (2010) tingkat pelaksanaan fungsi pangkalan pendaratan Ikan muara batu, Kabupaten Aceh Utara, Simanjuntak STO (2005) kajian fasilitas dan fungsi pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pasir dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

PPI Bonto Bahari di bangun di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros bertujuan sebagai tempat bongkar muat, tempat tambat labuh. Untuk menjalankan fungsi dan peranannya membutuhkan pengelolaan yang tepat, baik terhadap aktivitas maupun fasilitas yang dimiliki oleh PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros. Fungsi pelabuhan perikanan yang optimal merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Penelitian mengenai “Studi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan” belum pernah dilakukan sebelumnya sampai saat ini sehingga kurangnya informasi mengenai fungsi-fungsi yang berjalan di PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Studi Fungsi Pemerintahan dan Fungsi Pengusahaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan” berdasarkan Fungsi PPI Menurut PER.08/MEN/2012 yakni fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan agar fungsi-fungsi pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang terdapat pada PPI Bonto Bahari.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah fungsi-fungsi pada PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros berjalan sebagaimana fungsinya berdasarkan PER.08/MEN/2012?
2. Bagaimana tingkat keberfungsian dari PPI Bonto Bahari Kabupaten Maros menurut PER.08/MEN/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi fungsi-fungsi PPI Bonto Bahari yang berjalan sesuai dengan fungsinya berdasarkan PER.08/MEN/2012
2. Menghitung tingkat keberfungsian dari PPI Bonto Bahari berdasarkan PER.08/MEN/2012

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai data tambahan bagi peneliti selanjutnya dan bahan rujukan serta informasi bagi pemerintah daerah dan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak terkait untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan pelabuhan perikanan selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Definisi pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan perikanan yakni tempat yang terdiri dari daratan dan perairan yang berada di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang aktivitas perikanan.

Pelabuhan perikanan seharusnya dapat menjamin keberhasilan kegiatan penangkapan ikan di laut. Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat, serta memberikan efisiensi yang tinggi (Murdiyanto, 2004).

Pelabuhan perikanan merupakan fasilitas utama dalam kegiatan usaha penangkapan ikan dan memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap. Pada dasarnya pengelolaan pelabuhan perikanan merupakan suatu cara untuk memberikan pelayanan dan suasana yang baik kepada masyarakat pengguna pelabuhan perikanan, sesuai dengan fungsi dari pelabuhan perikanan itu sendiri (PIPP, 2021).

Dengan kata lain, pelabuhan perikanan sebagai pusat pengembangan ekonomi industri perikanan, dari segi produksi, pengolahan, dan pemasaran baik lokal, nasional maupun internasional dalam hal produksi, pengolahan dan pemasaran. Pelabuhan perikanan merupakan pusat penggabungan kegiatan penangkapan ikan laut dan distribusi hasil perikanan ke daerah konsumen (Lubis, 2012).

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994) adapun aspek aspek tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Produksi

Pelabuhan perikanan merupakan tempat bagi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk melaut sampai membongkar hasil tangkapannya.

2. Pengolahan

Pelabuhan perikanan sebagai penyedia berbagai sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapan.

3. Pemasaran

Pelabuhan perikanan sebagai pusat pengumpulan dan tempat untuk pemasaran hasil tangkapan

B. Fungsi dan Peranan Pelabuhan Perikanan

Terdapat dua jenis pengelompokan fungsi pelabuhan perikanan, yang dilihat dari pendekatan kepentingan dan dari segi kegiatan, kedua jenis kelompok tersebut pada dasarnya juga memiliki maksud dan tujuan yang sama. Fungsi pelabuhan perikanan berdasarkan pendekatan kepentingan adalah sebagai berikut (Lubis, 2006):

1. Fungsi maritim

Pelabuhan perikanan mempunyai aktivitas-aktivitas yang bersifat kemaritiman, yaitu tempat berkumpulnya para nelayan bagi nelayan atau pemilik kapal, antara laut dan daratan untuk semua aktivitasnya

2. Fungsi pemasaran

Pelabuhan perikanan adalah lokasi yang menjadi titik awal untuk mempersiapkan pemasaran produksi perikanan dengan melakukan transaksi melalui pelelangan ikan.

3. Fungsi jasa

Fungsi ini yang terdapat dalam pelabuhan perikanan ini meliputi keseluruhan jasa-jasa yang berada di pelabuhan mulai dari ikan didaratkan hingga ikan didistribusikan ke konsumen.

Dari segi kegiatan, fungsi pelabuhan perikanan yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan dilihat dari aspek pendaratan dan pembongkaran ikan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan. Fungsi-fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi pendaratan dan pembongkaran

Fungsi ini mengutamakan pelabuhan perikanan sebagai pusat fasilitas dan kegiatan pendaratan dan pembongkaran hasil tangkapan di laut. Pelabuhan perikanan merupakan tempat sentral bagi armada perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapannya, tempat berlabuh yang aman, yang dapat menjamin kelancaran bongkar muat ikan dan penyediaan perbekalan.

2. Fungsi pengolahan

Dalam fungsi ini, pelabuhan perikanan merupakan tempat pembinaan peningkatan dan pengendalian kualitas ikan dalam mencegah kerugian pasca-

tangkapan. Fungsi pengolahan ini merupakan salah satu fungsi penting untuk menampung produksi perikanan yang tidak dijual dalam bentuk segar, terutama pada musim ikan.

3. Fungsi pemasaran

Fungsi ini, pelabuhan perikanan dijadikan sebagai tempat terwujudnya mekanisme pasar yang dapat menguntungkan baik nelayan maupun pedagang. Oleh karena itu, sistem pemasaran pelelangan ikan harus tertata dengan baik dan rapi. Pelelangan ikan merupakan kegiatan pertama untuk memasarkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan, dengan tujuan mendapatkan harga yang wajar bagi nelayan.

4. Fungsi pembinaan terhadap masyarakat nelayan

Fungsi ini menunjukkan bahwa pelabuhan perikanan dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat dan sebagai tempat pembinaan bagi masyarakat nelayan seperti nelayan, pedagang, pengolah dan buruh angkut agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Melalui pembinaan ini, para pelaku atau pengguna di pelabuhan diharapkan dapat lebih memahami aktivitasnya untuk memastikan setiap pengguna mendapatkan manfaat yang optimal.

Karena pelabuhan perikanan merupakan tempat pertemuan antara transportasi darat dan laut, maka pelabuhan perikanan memiliki arti penting bagi pergerakan barang dan jasa dalam industri perikanan tangkap. Secara makro, pelabuhan perikanan juga dapat berperan sebagai salah satu sarana terpenting untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara fisik (non-ekonomi) maupun secara ekonomi (Suherman *et.al*, 2012).

Secara lebih rinci fungsi pelabuhan perikanan tercantum dalam UU No.45 Tahun 2009 Pasal 41 A Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yaitu :

1. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
2. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- n. pengendalian lingkungan.

Menurut Suherman *et.al* (2012) fungsi pelabuhan perikanan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi maritim, fungsi komersial, dan fungsi pelayanan. Fungsi maritim terlihat dalam kegiatan maritim, pelabuhan perikanan sebagai tempat kontak antara laut dan darat. Fungsi komersial muncul karena pelabuhan perikanan merupakan tempat awal penyiapan industri hasil perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan. Kemudian fungsi pelayanan meliputi seluruh pelayanan pelabuhan perikanan mulai dari pendaratan hasil tangkapan sampai dengan pendistribusian hasil tangkapan, seperti pelayanan pendaratan ikan dan bongkar muat kapal, penanganan mutu, pemeliharaan dan keamanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan Pasal 4, dijelaskan bahwa fungsi dari pelabuhan perikanan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Perikanan memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran
2. Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pelayanan standar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - b. Pelayanan bongkar muat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

- d. Pemasaran dan distribusi ikan;
- e. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- g. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan
- i. Pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. Pelaksanaan fungsi karantina ikan
- k. Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan berlandaskan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Pelabuhan perikanan memiliki dua fungsi yakni fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Dengan fungsi pemerintahan dan perusahaan, dapat mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan distribusi pemasaran. Berikut fungsi fungsi pelabuhan perikanan yang dijabarkan secara rinci:

1. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan adalah fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang meliputi :

- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
- b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan\
- f. pelaksanaan kesyahbandaran
- g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan
- h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan
- i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan
- j. pemantauan wilayah pesisir
- k. pengendalian lingkungan
- l. kepabeanan; dan/atau
- m. keimigrasian

2. Fungsi Pengusahaan

Fungsi Pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang mencakup:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
- b. pelayanan bongkar muat ikan
- c. pelayanan pengolahan hasil perikanan
- d. pemasaran dan distribusi ikan
- e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan
- f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan
- g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan
- h. wisata bahari
- i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994), pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusat kegiatan industri perikanan memiliki beberapa peranan, yakni:

1. Peranan pelabuhan perikanan yang berhubungan dengan aktivitas produksi, antara lain:
 - a. tempat mendaratkan hasil tangkapan perikanan
 - b. tempat untuk persiapan operasi penangkapan (mempersiapkan alat tangkap, bahan bakar, air, perbaikan alat tangkap, ataupun kapal)
 - c. tempat untuk berlabuh kapal perikanan
2. Sebagai pusat distribusi, peranan pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi, antara lain:
 - a. tempat transaksi jual beli ikan
 - b. sebagai terminal untuk mendistribusikan ikan
 - c. sebagai terminal ikan hasil laut
3. Sebagai pusat kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan yang berkaitan dengan aktivitas ini antara lain sebagai pusat :
 - a. kehidupan nelayan
 - b. pengembangan ekonomi masyarakat nelayan
 - c. lalu lintas dan jaringan informasi antara nelayan dengan pihak luar

C. Tipe dan Kriteria Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera (pelabuhan perikanan kelas A atau kelas I)

Pelabuhan perikanan tipe A merupakan pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan laut yang umumnya tergolong armada penangkapan ikan jarak jauh sampai dengan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah hasil tangkapan sesuai kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Jumlah ikan yang didaratkan minimal 200 ton per hari atau 73.000 ton per tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A ini dirancang untuk dapat menampung kapal berukuran lebih besar dari 60 GT (*gross tonnage*) sebanyak 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (pelabuhan perikanan kelas B atau kelas II)

Pelabuhan Perikanan Nusantara diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak sedang sampai ke perairan ZEEI, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah hasil tangkapan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah ikan yang didaratkan. Jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton per hari atau 18.250 ton per tahun untuk pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran sampai dengan 60 GT (*gross tonnage*) sebanyak 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan darat untuk pengembangan seluas 10 Ha.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai (pelabuhan perikanan kelas C atau kelas III)

Pelabuhan Perikanan Pantai diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di kawasan perairan pantai, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah hasil tangkapan sesuai dengan kapasitasnya yaitu minimum sebanyak 20 ton per hari atau 7.300 ton per tahun untuk pemasaran di daerah sekitarnya atau untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke pelabuhan perikanan yang lebih besar. Pelabuhan perikanan tipe C ini dirancang dapat menampung kapal berukuran sampai dengan 15 GT (*gross tonnage*) sebanyak 25 unit kapal sekaligus. Memiliki cadangan lahan darat untuk pengembangan seluas 5 Ha.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (pelabuhan perikanan kelas D)

Melengkapi ke tiga tipe pelabuhan perikanan tersebut maka didirikan suatu pangkalan untuk pendaratan ikan hasil tangkapan nelayan yang berskala lebih kecil daripada Pelabuhan Perikanan Pantai yang ditinjau dari kapasitas penanganan jumlah produksi ikan, maupun fasilitas dasar dan perlengkapannya. PPI diperuntukkan sebagai prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton per hari, dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha.

D. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sebutan untuk pelabuhan perikanan tipe D. Di PPI kegiatan tambat kapal/kapal penangkap ikan dilakukan dalam rangka mendaratkan hasil tangkapan, atau melakukan persiapan kembali ke laut (loading, logistik kapal dan awak kapal). Selain itu, merupakan pusat kegiatan produksi, pemasaran, pengolahan produk dan pengembangan masyarakat perikanan (Lubis, 2012).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sesuai fungsinya ditujukan untuk melayani masyarakat nelayan khususnya nelayan dengan perahu kecil dengan jangkauan penangkapan ikan di sekitar pantai. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimaksudkan sebagai prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan hingga 5 ton/hari, dapat menampung kapal penangkap ikan berukuran hingga 5 GT atau kapal layar tanpa motor dan hasil tangkapan yang didaratkan kurang atau sama. menjadi 20 ton per hari. hari dan ditujukan terutama untuk pemasaran lokal. Pelabuhan perikanan jenis ini umumnya terdapat di muara atau di tepi sungai, di daerah yang menjorok ke dalam atau terletak di teluk yang bukan buatan manusia atau sebagian buatan manusia (DKP, 2004).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER 08/MEN/2012 Bab II tentang kepelabuhan perikanan pasal 9, ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan operasional sebagai berikut:

1. Kriteria teknis terdiri dari :
 - a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;

- c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
2. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

E. Fasilitas Pelabuhan

Dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, pengelola pelabuhan perikanan harus dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang segala kegiatan yang berkaitan dengan penangkapan ikan yang selalu siap operasi setiap saat serta kemampuan teknis operasional yang harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan. petugas manajemen. Pengelola pelabuhan perikanan harus dapat menyediakan fasilitas fasilitas yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan usaha penangkapan ikan yang selalu siap untuk beroperasi setiap saat serta kemampuan teknis operasional yang harus dimiliki oleh petugas-petugas pengelola pelabuhan perikanan. (PIPP, 2021).

Kapasitas dan jenis fasilitas yang terdapat di pelabuhan perikanan umumnya akan menentukan skala atau jenis pelabuhan perikanan itu sendiri terkait dengan usaha perikanan. Fasilitas ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis perikanan. Pengembangan fasilitas diartikan sebagai peningkatan fasilitas dan kapasitas pelabuhan perikanan. Dengan kata lain, peningkatan fasilitas dan kapasitas sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan (Lubis, 2012).

Pelabuhan perikanan sebagai prasarana penangkapan ikan menjadi faktor penting dalam pembangunan perikanan. Fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan terkait dengan kinerja di pelabuhan perikanan secara efisien dan efektif sebagai pusat kegiatan di bidang perikanan (Ariani, *et.al*, 2020).

Menurut Rahayu (2016) pelabuhan perikanan dalam menjalankan fungsinya harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas pokok untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional serta fasilitas fungsional untuk meningkatkan fungsi fasilitas dasar yang dapat membantu kegiatan di pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoptimalkan perannya di pelabuhan dan saat melakukan aktivitas di pelabuhan.

Tingkat keberhasilan suatu pelabuhan perikanan terletak pada kemampuannya menarik kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan pendaratan ikan ke dalam

kawasan TPI dan melakukan pelelangan hasil tangkapan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pelayanan yang berkualitas dan pengelolaan sarana operasional yang saling bersinergi secara optimal (PIPP, 2021).

Pelabuhan perikanan yang sesuai mempunyai fasilitas yang mengharuskan pelabuhan tersebut dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Dalam pembangunan pelabuhan, beberapa hal harus diperhatikan, dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Menurut Ayodhya (1975) pelabuhan perikanan yang sesuai memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. jarak tidak terlalu jauh dari *fishing ground*,
- b. lokasi berhubungan dengan daerah pemasaran ikan,
- c. memiliki daerah yang luas untuk pendaratan ikan dan industri penunjang lainnya,
- d. tempatnya menarik untuk tempat tinggal nelayan, penjual ikan dan pengusaha ikan,
- e. aman dalam segala cuaca,
- f. aman secara alami dan buatan bagi kapal yang berlabuh dari segala cuaca,
- g. biaya masuk akal untuk mendapatkan kedalaman air yang memadai pada alur pelabuhan dan pangkalan pelabuhan,
- h. biaya untuk pengerukan pelabuhan murah,
- i. daerah cocok untuk membangun pemecah gelombang, pangkalan pelabuhan, dan sarana di pantai menjadi satu unit yang disesuaikan dengan perencanaan terpadu, daerah luas sehingga tidak menyulitkan pengembangan pelabuhan

Pelabuhan perikanan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan tipe atau karakteristiknya masing-masing. Dengan kata lain dapat melindungi kapal-kapal yang sedang berlabuh dan aktif di kawasan pelabuhan. Pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna menjalankan fungsinya baik fasilitas pokok (*basic facilities*) maupun fasilitas fungsional (*functional facilities*). Fasilitas pokok pelabuhan terdiri atas fasilitas perlindungan (*protective facilities*), fasilitas tambat (*mooring facilities*) dan fasilitas perairan pelabuhan (*water side facilities*). Fasilitas perlindungan berfungsi untuk melindungi kapal dari pengaruh buruk yang diakibatkan perubahan kondisi oseanografis (gelombang, arus, pasang, aliran pasir, erosi, luapan air di muara sungai dan sebagainya). Bentuk fasilitas perlindungan dapat berupa *breakwater*, *groin*, tembok laut, atau bangunan maritim lainnya. Fasilitas *mooring* digunakan untuk kapal bertambat, bongkar muat ikan, berlabuh dan *idle berthing*. Fasilitas ini dapat berupa dermaga pendaratan, *mooring quays*, *bollards*, *piers*, dan *slipways*. Fasilitas perairan berguna untuk pintu masuk pelabuhan dan manuver kapal

di areal pelabuhan dan untuk kapal berlabuh (*anchorage*). Fasilitas dapat berbentuk alur atau kanal pelayaran atau kolam pelabuhan. (Mallawa *et.al*, 2016)

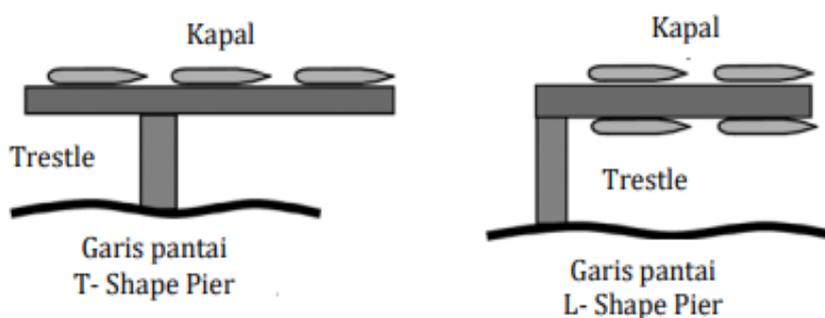
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16 /MEN/2006 fasilitas pelabuhan perikanan terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional; dan fasilitas penunjang;

1. Fasilitas Pokok

Menurut Lubis (2012) Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan dalam kegiatan di pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengoperasian kapal, baik pada saat berlayar maupun pada saat berlabuh di pelabuhan serta untuk mengurangi gangguan alam yang disebabkan oleh faktor alam. Fasilitas utama dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Dermaga

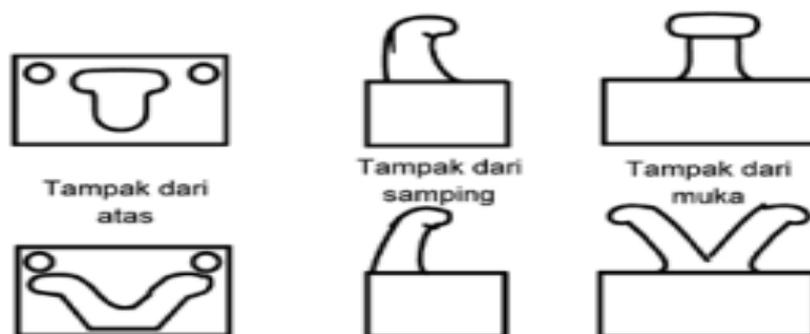
Menurut Lubis (2012) dermaga adalah bangunan laut yang digunakan sebagai tempat tambatan kapal, bongkar muat hasil tangkapan, dan tempat pengisian bahan bakar kapal serta perbekalan untuk menangkap ikan. Dermaga merupakan fasilitas dasar yang sangat penting untuk melayani kapal yang berlabuh. Aktivitas penggunaan sehari-hari sangat efektif. Ilustrasi bentuk dermaga dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1. Ilustrasi bentuk dermaga

b. Bolder kapal (*Bollard*)

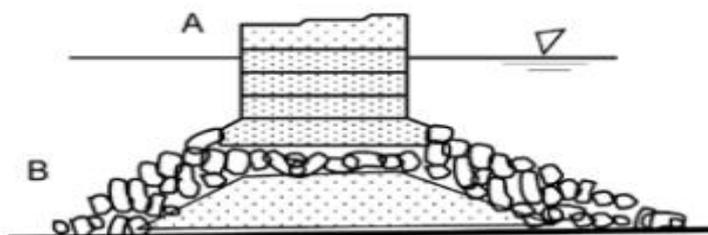
Menurut Suherman *et.al* (2012) *bollard* terdapat di ujung tepi dermaga yang digunakan untuk mengikat tali tambat kapal, untuk menambatkan kapal penangkap ikan kecil dan banyak kapal pesiar yang terbuat dari kayu. Di pelabuhan-pelabuhan besar, umumnya terbuat dari beton, besi atau baja. Ilustrasi bentuk *bollard* dapat dilihat pada Gambar 2



Gambar 2. Ilustrasi bentuk *bollard*

c. Pemecah gelombang (*Breakwater*)

Menurut Murdiyanto (2004) *breakwater* atau dalam bahasa Indonesia disebut pemecah gelombang atau penahan gelombang yaitu suatu bangunan yang dirancang sebagai pelindung utama pelabuhan dengan mengurangi ketinggian gelombang laut terutama pada saat terjadi cuaca buruk disertai gelombang besar yang dapat mengganggu proses aktivitas di pelabuhan. Ilustrasi pemecah gelombang dapat dilihat pada Gambar 3.



Ket : A : Blok beton
B : Tumpukan batu

Gambar 3. Ilustrasi pemecah gelombang

d. Kolam pelabuhan

Kolam pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk keperluan operasi sandar dan olah gerak kapal serta mempunyai kedalaman yang cukup untuk kapal yang beroperasi. Ukuran kolam pelabuhan biasanya disesuaikan dengan ukuran dermaga, terutama kedalamannya dan disesuaikan dengan ukuran kapal yang beroperasi di pelabuhan (Suherman *et.al*, 2012).

e. Alur pelayaran (*Navigational channel*)

Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal yang beraktivitas (Dephub, 2016).

Bentuk pelayanan pelabuhan salah satunya yakni menjamin keamanan navigasi kapal saat mendekati tempat berlabuh. Kedalaman alur pelayaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan karena terkait dengan keamanan manuver kapal (Suherman *et.al*, 2012).

f. Drainase

Drainase memiliki arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum drainase adalah seperangkat bangunan air yang digunakan untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air pada suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Perancangan drainase dilakukan bertujuan agar air hujan yang jatuh di kawasan pelabuhan perikanan tidak menggenang dan dapat dialirkan ke laut sebagai badan air terdekat (Musbikhin, 2016).

Sistem drainase pada pelabuhan perikanan di pengaruhi faktor-faktor yang berasal dari pantai dan laut. Karakteristik kepantauan tersebut antara lain pasang surut, arus, angin, dan gelombang (Salim, 2020).

g. Alat bantu navigasi

Alat bantu navigasi adalah alat yang digunakan untuk memberitahukan peringatan atau tanda bahaya yang tersembunyi, memberikan petunjuk atau petunjuk agar kapal dapat berlayar dengan aman di sepanjang pantai, sungai dan perairan lainnya, serta memberikan petunjuk dan petunjuk pada saat kapal akan keluar masuk pelabuhan atau ketika kapal akan berlabuh dan membuang jangkar (Lubis, 2012).

2. Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai guna fasilitas dasar sehingga dapat menunjang segala kegiatan di pelabuhan. Fasilitas tersebut tidak harus di pelabuhan perikanan tetapi fasilitas tersebut disediakan sesuai dengan kebutuhan pengoperasian pelabuhan perikanan (Lubis, 2012).

Menurut Lubis (2012), Fasilitas fungsional dikelompokkan menjadi beberapa bagian yakni:

- a. Penanganan hasil tangkapan dan pemasaran, yang terdiri dari:
- Tempat pelelangan ikan (TPI), digunakan sebagai tempat untuk melelang ikan, dimana terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan);
 - Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, seperti gedung pengolahan, tempat penjemuran ikan dan lain-lain;
 - Pabrik, digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan mutu ikan pada saat operasi penangkapan dan pengangkutan ke pasar atau pabrik;
 - Gudang es, diperlukan apabila produksi kemungkinan tidak terserap pasar secara keseluruhan, pabrik es jauh dari dermaga perbekalan (*out fitting*) atau kemungkinan mendatangkan es dari luar;
 - Refrigerasi/fasilitas pendinginan, seperti *cool room*, *cold storage*;
 - Gedung-gedung pemasaran, dimana tempat ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti alat sortir, timbangan, pengepakan dan lain-lain.
 - Dan lain sebagainya
- b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkap ikan, yang terdiri dari:
- Tempat penjemuran alat penangkap ikan;
 - Bengkel: fasilitas untuk memperbaiki mesin kapal;
 - *Slipway*: tempat untuk memperbaiki bagian lunas kapal;
 - Gudang jaring: tempat untuk penyimpanan jaring;
 - *Vessel lift*: fasilitas untuk mengangkat kapal dari kolam pelabuhan ke lapangan perbaikan kapal.
 - Dan lain sebagainya
- c. Fasilitas perbekalan, yang terdiri
- Tangki dan instalasi air minum,
 - Tangki bahan bakar.
 - dan lain sebagainya
- d. Fasilitas komunikasi, yang terdiri dari
- Stasiun jaringan telepon
 - Radio SSB.
 - Dan lain sebagainya

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan dan pengguna pelabuhan memperoleh kenyamanan dalam melakukan aktivitas di pelabuhan. Menurut Lubis (2012), fasilitas ini berupa:

a. Fasilitas kesejahteraan, yang terdiri dari:

- MCK
- Poliklinik
- Mess
- Kantin,
- Musholla
- Dan lain sebagainya

b. Fasilitas administrasi yang terdiri dari:

- Kantor pengelola pelabuhan
- Ruang operator
- Kantor Syahbandar
- Kantor beacukai
- Dan lain sebagainya

F. Tingkat Keberfungsian Pangkalan Pendaratan Ikan

Dalam rangka meningkatkan produksi hasil tangkapan perlu diimbangi dengan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan yang menjadi pusat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan yang dapat difungsikan secara optimal (Lubis, 2011).

Pelabuhan perikanan memiliki fungsi untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan dan sumberdaya manusia di lingkungan sekitar termasuk wilayah pesisir, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pelabuhan perikanan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat setempat khususnya nelayan yang sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan perikanan (Syakuro *et.al*, 2020).

Pelabuhan perikanan dalam mendukung fungsi dan perannya perlu dilengkapi dengan fasilitas dan membutuhkan orang-orang yang dapat mengelola fasilitas yang ada agar semua kegiatan di pelabuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan fungsi dan peran pelabuhan perikanan dapat meningkatkan hasil perikanan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan (Hatta *et.al*, 2014).

Perkembangan taraf hidup sosial ekonomi nelayan menjadi parameter bahwa pelabuhan perikanan berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan. Tidak hanya mendukung fasilitas pendaratan kapal, kargo, dan awak kapal, tetapi juga harus mendukung banyak aspek lain seperti kelayakan tempat pelelangan ikan, informasi birokrasi pelabuhan, dan fasilitas lainnya (Syakuro *et.al*, 2020).

Tingkat keberfungsian berdasarkan literatur yang ada yakni menurut Wanda (2019) tingkat keberfungsian untuk PPI Balambang dari aspek pemerintahan mendapatkan nilai kesesuaian sebesar 29,5% sedangkan aspek perusahaan 32% maka secara keseluruhan didapat nilai kesesuaian sebesar 38%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa PPI Balambang tidak berfungsi baik fungsi pemerintahan maupun fungsi perusahaan disebabkan fasilitas pelabuhan yang belum memadai, minimnya tenaga kerja, biaya operasional belum tersedia dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat.

Menurut Suharsi (2020) tingkat keberfungsian untuk PPI Cempae pada fungsi pemerintahan PPI Cempae didapatkan nilai perolehan sebesar 31 dimana nilai seharusnya 50 dengan nilai kesesuaian 62% yang mengidentifikasi bahwa PPI Cempae masuk dalam kategori kurang dan fungsi perusahaan PPI Cempae didapatkan nilai perolehan sebesar 34 dimana nilai seharusnya 50 dengan nilai kesesuaian 68% yang mengidentifikasi bahwa PPI Cempae berfungsi baik. Sehingga PPI Cempae baik dilihat dari fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan sudah berjalan dengan baik, dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada. Tetapi masih ada sebahagian fungsi yang perlu dilakukan diantaranya adalah fasilitas pelabuhan yang kurang memadai,

Sebagian besar Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan di Indonesia (70%) belum berfungsi secara optimal dan belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan modern, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pelabuhan Perikanan yang ada belum berkembang. Fungsi pelabuhan perikanan yang belum optimal antara lain karena beberapa fasilitas yang ada sudah rusak dan sudah lama tidak diperbaiki; kapasitasnya saat ini sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu dilakukan perluasan atau mekanisasi fasilitas yang ada. Beberapa fasilitas yang ada tidak digunakan karena tidak dibutuhkan atau sebaliknya sudah saatnya suatu fasilitas dibutuhkan tetapi tidak tersedia (Lubis, 2011).

Fasilitas diperlukan mulai dari persiapan operasi penangkapan hingga saat mendaratkan hasil tangkapan lalu dipasarkan. Tidak tersedianya salah satu fasilitas yang diperlukan, kapasitas yang tidak mencukupi, dan tata letak pelabuhan perikanan yang tidak tepat dapat menghambat kelancaran dan kinerja berbagai kegiatan di

pelabuhan perikanan. Ketidaklengkapan fasilitas yang memadai akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan (Lubis dan Mardiana, 2011).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai Pelabuhan Perikanan/PPI, kondisi fasilitas dan keberadaan PP/PPI perlu diperhatikan. Kondisi setiap fasilitas yang baik atau layak pakai akan menentukan seberapa besar fasilitas jenis ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya (Najah, *et al.* 2012).